

REKAP JAWABAN DAN SARAN PERTANYAAN MUSRENBANG VIA WHATSAPP

1. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :

Assalamualaikum wr wb, ada jalan di kec. Ambal yang menghubungkan wilayah desa dukuh rejosari, desa surobaran sampai desa pagedangan dari beberapa tahun yang lalu tidak ada pembangunan, Apakah itu dibangun oleh desa melalui dana APBD atau siapa, mohon solusinya, karena udah bertahun-tahun tidak cuma 3 atau 4 th (Bidang IK)

Jawaban :

Wangalaikumsalam wr.wb. Terimakasih masukannya. Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020, kondisi ruas jalan kabupaten di daerah surobaran adalah sbb:

1. Ruas Surobaran – Keradenan (Ambal), panjang jalan 1,247 km (1,247 km permukaan aspal) semuanya dalam kondisi baik

2. Ruas Rejosari – Pagedangan (Ambal), panjang jalan 2,350 km (1,35 km permukaan aspal, 1 km permukaan tanah), kondisi sedang 0,400 km dan kondisi rusak berat sepanjang 1,950 km

Ruas jalan yang kabupaten yang rusak tersebut, akan menjadi shorlist jalan rusak DPUPR, semoga dapat diperbaiki melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jalan kabupaten, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Nama : Warsito
Alamat : Pejagoan
Pertanyaan :

Siltap kades agar bisa layak (sementara selisih 250 K dengan sekdes), padahal tanggungjawabnya lebih berat. Perlu adanya tambahan alokasi dana dari kabupaten untuk mewujudkan kesejahteraan kades yang tentunya akan berkait secara signifikan pada kinerja kades.

Mohon untuk dimasukkan dalam dokumen RKPD syukur sudah bisa terealisasi di tahun 2020. Terima kasih.
(Bidang PPM) :

Jawab : Mendasari PP Nomor 11 Tahun 2019 bahwa :

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluhan enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan.

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Jadi Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.

3. Nama : Sutarjo
Alamat : Desa Seling
Pertanyaan :

1. Apakah usulan yang melalui dana pokir sudah mengacu target tahun terakhir RPJMD? (Bidang PPP)

2. Silpa dana Pokir apakah bisa digunakan diluar Pokir? (Bidang PPP)

3. Ada kegiatan Kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 4.200 kunjungan dengan anggaran Rp 1.600.000; kalau kita bagi 12 bulan : 24 hari = 14 kunjungan, pertanyaan nya setiap hari Dewan mengadakan kunjungan 14 tempat itu akan kunjungan kemana saja? (Bidang PPM)

Jawab : Berdasarkan koordinasi dengan Sekwan bahwa setiap Anggota DPRD mendapat kuota perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 7x dalam 1 bulan. Kunjungan kerja tersebut untuk menindaklanjuti hasil rapat komisi.

4. Dengan adanya perpres nomor 36 tahun 2019 penghematan anggaran, kami mohon Bapak Bupati ada kebijakan untuk (Bidang PPM)

a. menambah siltap Kepala desa

b. mengganti kendaraan dinas kepala desa

Jawab : Terkait dengan nomor 3 point 4 huruf a jawaban sama dengan nomor 2.

Jawab : Terkait dengan nomor 3 point 4 huruf b jawaban : Menunggu kebijakan Bupati.

MASUKAN.

Pemdes membutuhkan pembinaan dari Inspektorat namun ada kendala diantaranya kekurangan personal dan anggaran, Inspektorat hanya mampu melayani 80 Rubik dalam setiap tahunnya sehingga 5 tahun sekali baru bisa ketemu, untuk itu kami mengusulkan ada penambahan anggaran dan personal tenaga untuk Inspektorat.

(Bidang PPM)

Jawab : Anggaran yang dikelola oleh Inspektorat sudah naik menjadi 3% dari APBD, sedangkan untuk penambahan formasi personil pengawas di Inspektorat sangat terbatas.

4. Nama : Nuryadi
Alamat : Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kebumen
Pertanyaan :

Mohon untuk data ulang penerima bantuan (PKH, RASKIN, BEDAH RUMAH, DLL) sekaligus tolong dipasang plang PENERIMA BANTUAN PKH dll, karena selama ini masyarakat mengaku miskin dikala ada bantuan, dengan adanya plang saya rasa yang menerima bantuan kalau tidak tepat sasaran akan berfikir 2X. Karena selama ini saya pribadi belum pernah melihat adanya tulisan/plang di rumah-rumah yang menerima bantuan. Terimakasih (Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya akan kami koordinasikan dan sebelumnya sudah pernah ada pemasangan Stiker Rumah Tangga Miskin oleh Dinas Sosial PPKB.

5. Nama : Kepemudaan (Beniyanto)
Alamat : Perwakilan Organisasi KNPI Kebumen
Pertanyaan :

Ada masukan terkait

- a. Dalam Pembangunan kualitas Kepemudaan mohon agar menjadi perhatian. Sebab selama ini masih kurang. Sementara pembangunan Olahraga selalu mendapat perhatian yang besar. Padahal pembangunan SDM Kepemudaan jauh lebih penting untuk mendukung tercapainya pembangunan yang merata. Selama ini program kepemudaan. Misal untuk mengurangi pengangguran, lebih banyak mengarah kepada usia yang baru lulus sekolah. Padahal usia pemuda yang dibutuhkan untuk terjun langsung membantu masyarakat hingga usia 35-37 tahun (Bidang PPM)

Jawaban: Terkait hal ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Disporawisata dan Disnaker KUKM

- b. Dibidang pendidikan. (Bidang PPM)

Mohon kebijakan bantuan DAK ruang kelas pendidikan ditinjau ulang. Sebab setiap tahunnya pasti ada sekolah yang di regrouping yang akhirnya bangunan tidak terpakai. Sementara sekolah2 yang dibanjiri pendaftar (dikenal sbg sekolah favorit) terus menerus menarik sumbangan dana kepada wali siswa untuk mendukung pembangunan gedung. Apakah tidak sebaiknya bangunan-bangunan gedung eks sekolah yang diregrouping dikerjasamakan penggunaanya dengan sekolah yang membutuhkan ruang kelas. Jika sekolah-sekolah yang dikenal favorit terus menambah ruang kelasnya, tentu sekolah-sekolah lain yang siswanya terus berkurang akan terancam hilang siswanya ditahun ajaran selanjutnya

Jawab : Terima kasih atas masukannya, akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan.

6. Nama : Beniy
Alamat : FBI (Forum Lintas Suku dan Etnis Kebumen)
Pertanyaan :

Pasca pandemi covid19 Mohon untuk efisiensi anggaran disetiap SKPD yang menganggarkan pengadaan seragam atau tas kegiatan untuk dihapus atau dihilangkan. Sebab hampir sebagian besar OPD dalam kegiatannya menganggarkan hal tersebut yg dananya cukup lumayan besar. Padahal manfaat pengadaan sprt seragam dan tas kegiatan manfaatnya tidak terlalu utama. Jika sudah terdapat uang saku peserta, saya yakin sragam atau tas peserta tidak ada juga tidak masalah Dan dana pengadaan tersebut bisa digunakan utk kegiatan2 lainnya yg lebih penting seperti pemulihan ekonomi pasca pandemik covid19

(Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya.

7. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :

Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk penanganan Covid 19 didesa kategorinya seperti apa , biar Desa dalam menganggarkan tidak kesalahan , mohon penjelasannya, terimakasih

1. Menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati atas capaian kerja s/d tahun ini. Dan atas pelaksanaan musrenbangkab 2021 ini, dimana dilaksanakan secara virtual dalam rangka untuk kewaspadaan penularan covid19.

2. Dalam rangka penanganan pencegahan dan penyebaran covid19 ini, kami mohon pemda hrs serius, terencana dengan baik dan terstruktur. Dengan mengajak warga masyarakatnya untuk saling bahu membahu memerangi meningkatnya perluasan wabah virus19 ini. Untuk itu :

a. Pemda harus punya data valid tentang lokasi merah, kuning dan hijau. Pemda harus punya data valid dan cepat orang positif, pdp dan odp. (Bidang PPM)

Jawab : Pemkab Kebumen sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid 19, dan Posko penanganan Covid 19 di Dinas Kesehatan (PSC 19), Posko Tim Penanganan Covid Tingkat Kecamatan dan Tim Penanganan Covid 19 Tingkat Desa. Untuk data sudah upate setiap hari.

b, Pastikan Rumah sakit tidak kekurangan APD (Bidang PPM)

Jawab : APD sudah disiapkan anggaran untuk pengadaannya baik dari APBD, DAK dan DAU baik di Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit.

c, Diperhatikan dan dipikirkan Solusi warga miskin yang terdampak covid19, baik saat ini, menengah dan jangka panjang. (Bidang PPM)

Jawab : Telah dibuat kajian terkait penanganan Covid 19 jangka pendek , menengah dan jangka panjang terkait *social safety net* dan *economy safety net*.

d, Menganggarkan dengan anggaran yang signifikan. Sehingga jangan sampai kami mendengar penanggulangan ini tidak maksimal karena anggaran yang kurang. (Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih masukannya.

3. Kalau kebumen ingin keluar dari zona miskin, maka beberapa hal yang harus disikapi : (Bidang PPM)

a, punya data pilah dan peta warga miskin yang valid dan lengkap, tanpa rekayasa. Dengan data satu pintu.

Jawab : Data sudah valid karena ada Verifikasi dan Validasi data setiap 3 bulan sekali.

b, perencanaan yang matang, terpadu antar opd, koordinatif dan sinkronisasi serta mengedepankan untuk kepentingan masyarakat dan menghilangkan ke egoismenya masing-masing OPD.

c, penanggulangan kemiskinan dilakukan dg cara 'gropokan'.

4. Dlm rangka menghapuskan rentenir, saya mohon pemda juga memperhatikan dan mendorong serta mensupport tumbuhnya lembaga2 keuangan syariah /BMT/KSPPS. (Bidang PSDA)

Jawab : Selama lembaga keuangan tersebut memenuhi syarat pendirian, Pemkab memberikan support dalam bentuk kemudahan perijinan.

5. Untuk mengurangi pengangguran, maka : (Bidang PSDA)

a, pemda harus cerdas dan kreatif dalam menciptakan lapangan kerja.

b, program pemberdayaan masyarakat misal pelatihan, kursus, hrs dilaksanakan secara terencana dg baik, terkoordinir antar opd.

Jawab : Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan sudah dilakukan dan terus dilakukan, dengan memperbaiki proses monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut, sehingga diharapkan akan tepat sasaran di masa yang akan datang

6. Kebumen sudah mempunyai Perda KTR, sudah cukup lama. Tp sy melihat Pemda tidak serius dalam implementasi Perda tersebut. (Bidang PPM)

Jawab : Sosialisasi Perda KTR sudah dilakukan, masing masing OPD sudah mempunyai ruang khusus untuk merokok, promosi dan edukasi terus digencarkan.

8. Nama : Akif Fatwal Amin

Alamat : Ketua Dpc K-Spsi Kab. Kebumen (Delegasi dari Disnakerkop dan UMK Kabupaten Kebumen)

Pertanyaan :

A. Kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19: (Bidang PPM)

1. Semoga Allah Swt selalu memberikan kekuatan, perlindungan kepada semua team Gugus Tugas dalam menjalankan tugas mulia ini.

2. Dalam upaya melindungi para pekerja yang masih bekerja/berjuang untuk menjaga kesetabilisan ekonomi, kami memohon kepada team Gugus Tugas Penanganan juga memantau/mengontrol ke perusahaan-perusahaan dalam melakukan standar pencegahan penyebaran Covid 19 terutama perusahaan yang tidak mungkin melakukan "work from home" dan perusahaan yang mendatangkan logistik /bahan baku produksi dari luar Kabupaten Kebumen.

Note : DPC K-SPSI siap dilibatkan bila dibutuhkan

Jawab : Terima kasih atas masukannya, apabila dibutuhkan akan kami koordinasikan.

B. Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Meminta Keseriusan Pemkab Kebumen dalam mengawal implementasi UMK (upah minimum kabupaten) terutama pada para pekerja THL (Tenaga Harian Lepas) di lingkup OPD Kebumen yang masih sangat memprihatinkan. (Bidang PSDA)
2. Mempertanyakan dasar hukum perbup no 51 tahun 2019, tentang Silpa atau yang mengatur tentang Upah untuk THL (Bidang PSDA)
3. Untuk profesionalisme, penghematan dan kejelasan Pekerja THL, agar THL di lingkup OPD Kabupaten Kebumen Tenaga Harian Lepas di pihak ketigakan (Outsorsing). (Bidang PSDA)

Mohon kepada bapak Bupati agar permohonan dari DPC - HNSI yang sudah masuk sesuai proposal agar bisa terealisasi (Bidang PPM).

Jawab : Akan dikoordinasikan dengan OPD terkait (BPKAD)

Jawab HNSI: Terkait dengan proposal HNSI yang telah disampaikan kepada Bupati, dinas kelautan dan perikanan telah melakukan verifikasi teknis disesuaikan dengan kapasitas pagu anggaran serta kebutuhan di lapangan. Dari hasil verifikasi tersebut, sebagian usulan dapat dilaksanakan dan akan dimasukkan ke dalam dokumen rencana kerja dinas kelautan dan perikanan

9. Nama : Kuat
Alamat : Desa Kalirejo Karanggayam
Pertanyaan :

1. Desa Kalirejo Merupakan Desa yang masuk 6 Besar Di Kecamatan Karanggayam dan Desa Pertama yang Mengalami Bencana Kekeringan, Saya menayakan, Proyek embung irigasi andalan jawa tengah tahun 2004 dengan penyedia jasa PT. Adiccon Mulya dengan nomor kontrak 04/RPM-DD-IRGI/JATENG/2004/01 tanggal 6 Juli 2004, sampai saat ini belum ada kejelasnya. (Bidang IK)

Jawaban :

Terimakasih masukannya. Secara teknis embung di Kalirejo bisa dikategorikan Bendung Kecil, sehingga memerlukan lahan yang sangat luas, detail teknis bangunan air yang rumit, biaya yang mahal, serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Bangunan air tersebut memerlukan kajian teknis dan lingkungan yang komprehensif. Oleh karenanya, Proposal usulan pembangunan embung di Kalirejo Karangsambung pada tahun 2020 sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dikawal oleh DPRD dan juga DPUPR. Mohon kerjasamanya untuk didukung Bersama.

10. Nama : Purwanto
Alamat : Delegasi Kecamatan Prembun
Pertanyaan :

1. Apakah Rekapitulasi hasil musrenbangcam tahun 2019 yang tidak terakomodir atau tidak terlaksana oleh kabupaten berdasarkan laporan pemaparan bappeda akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai skala prioritas ? (Bidang PPP dan PPM)

Jawab : Apabila Hasil Musrenbangcam yang tidak terakomodir dan tidak terlaksana oleh kabupaten apabila memang prioritas bisa dimunculkan kembali dalam Musrenbangcam.

2. Mohon petunjuk dan arahan dari DPUPR untuk pembuatan/pengalihan jalan desa ke jalan kabupaten (K1) syarat dan aturannya. Terimakasih. (Bidang IK)

Jawaban :

Sesuai pasal 62 ayat (3) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan status suatu ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terakhir Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/889 Tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, tanggal 2 Agustus 2017. SK Penetapan Jalan tersebut diubah secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun, berarti pada tahun 2022.

Mekanisme perubahan fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan diatur dalam pasal 64, sebagai berikut:

1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:

- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

11. Nama : Sugiyono
Alamat : Delegasi Kecamatan Prembun
Pertanyaan :

Jln Guyangan - Petanahan merupakan jalan alternatif, dimana kondisi saat ini, frekuensi kendaraan yang lewat semakin meningkat, disamping juga merupakan jalan menuju obyek wisata, sehingga perlu disediakan anggaran pemeliharaan yang signifikan. Kami juga mohon info untuk jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi atau Kabupaten Kebumen? Sehingga jangan sampe terbengkalai, Provinsi dan Kabupaten tidak ada yang sediakan anggaran pemeliharaan. (Bidang IK)

Jawaban :

Terimakasih masukannya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/889 Tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, maka Jln Guyangan - Petanahan masuk ruas jalan kabupaten dengan dua ruas. Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020, kondisi ruas:

- a. Purwodeso – Petanahan (Adimulyo, Petanahan, Sruweng) panjang jalan 9,967 km (3,967 km permukaan aspal, 6 km beton), kondisi baik 9,000 km dan rusak ringan 0,967 km.
- b. Petanahan – Pantai (Petanahan) panjang jalan 3,110 km (1,522 km permukaan aspal, 1 km beton, 0,614 kerikil) kondisi baik 2,410 km dan kondisi rusak ringan 0,700 km.

Kedua ruas jalan tersebut masuk prioritas kabupaten karena menghubungkan jalan nasional dengan JJLS, dan juga jalan menuju obyek wisata dan menuju rencana Kawasan Peruntukan Industri. Jalan tersebut sedang diusulkan menjadi jalan provinsi, namun harus ditingkatkan dulu kondisinya sesuai standar jalan provinsi. Peningkatan jalan beton sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, dimulai dari arah utara, Guyangan sampai dengan Pasar Burung Petanahan. Adapun ruas jalan yang rusak di selatan Pasar Petanahan sampai dengan JJLS akan ditingkatkan menjadi jalan beton pada tahun 2020 dan 2021 dengan dana APBD dan usulan APBD Provinsi. Semoga tahun 2021 sudah bisa menjadi jalan provinsi. Mohon kerjasama dan dukungannya.

12. Nama : Bintang
Alamat : Formasi
Pertanyaan :

Mohon penjelasan mekanisme penggunaan dana desa yang dialihkan untuk kedaruratan sesuai permendes 16 th 2019 terkait musyawarah desa, karena APB Desa 2020 sudah ditetapkan, supaya alur perencanaan penganggaran sesuai prosedur berlaku. (Bidang PPM).

Jawab : Mendasari SE Kemendes PDTT Nomor 8 tahun 2020, maka perubahan APBDes dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran apabila terjadi kedaruratan atau kejadian luar biasa. Atau menggeser pembelanjaan bidang dan subidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

13. Nama : Kecamatan Rowokele
Alamat : Desa Wagirpandan, Wonoharjo, Giyanti, Sukomulyo
Pertanyaan : -

Yth para kades di kab kbm, dlm rangka tanggap darurat covid-19, desa berpedoman pada:

1. SE MENDES PDTT RI NO 8 th 2020 ttg desa tanggap covid-19 & PENEGASAN PKTD.
2. Surat kadinas prov jateng NO 412.2/255 ttg pencegahan dan penanganan COVID-19 & PEMBENTUKAN POSKO DI DESA
3. Surat kadinas PERMADES P3A NO.140/100 Yth perubahan APBDES karena KLB.

Saran dan masukan:

Jangan pernah lupa kalau kebumen punya wilayah di bagian paling barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten banyumas dan banjarnegara.

Kami sangat berharap betul wilayah Barat utara kabupaten kebumen yang saat ini berada di zona merah kemiskinan mendapatkan perhatian khusus terutama di infrastruktur. (Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya, akan kami koordinasikan lebih lanjut.

14. Nama : Zen Kholik
Alamat : Forum BPD Kabupaten Kebumen
Pertanyaan :

Kami mohon kepada Bupati

- a. Untuk bisa menambah aloksi dana operasional BPD se- Kabupaten Kebumen

Jawab : Mendasari PP Nomor 11 Tahun 2019 pasal 100 ayat 1 point b bahwa : paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Mengalokasikan dana tunjangan kinerja bagi seluruh anggota BPD Kabupaten Kebumen
- c. Memohon bisa di adakan silaturahmi satu tahun satu kali dengan seluruh anggota BPD

Jawaban Point b dan C: Terima Kasih atas masukannya, disesuaikan dengan Kemampuan keuangan daerah.

(Bidang PPM)

Jawab : Berdasarkan

15. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :

Assalamualaikum wrwb terkait firus korono dan pencegahannya mohon penjelasan berapa maksimal dana desa untuk anggaran itu.

Jawab : Mendasari SE Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 bahwa tidak diatur besaran untuk penanggulangan covid 19, hanya disesuaikan dengan kebutuhan masing masing desa.

Terkait peraturan dan himbauan warga perantau tidak pulang kampung sampai waktu aman kurang tegas sehingga desa asal perantau bakal banjir pendatang / orang mudik. Desa belum siap menerima untuk pencegahan dan mengantisipasi pendatang bagaimana solusi yang baik.

(Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya, kabupaten Kebumen telah melakukan persiapan untuk menanggulangi terkiat dengan pemudik yaitu adanya Posko di perbatasan masuk wilayah kebumen, Pemudik wajib lapor diri kepada Tim Covid desa.

16. Nama : Mustolih
Alamat : Desa Kenteng, Sempor
Pertanyaan :

Jalan lingkar utara penghubung desa kenteng dan donorojo sudah bukan rusak lagi tapi seperti sungai kering mohon sekiranya untuk di perbaiki dan kalo memang ijin dari perhutani atau dinas terkait belum keluar harap disiasati tidak harus dikerjakan lebar 6 M. Matur nuwun

(Bidang IK)

Jawaban :

Terimakasih masukannya. Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020, kondisi ruas jalan Kenteng – Ketileng (Sempor), panjang jalan 11,210 km (7,500 km beton, 0,800 km kerikil, 2,910 km tanah) dengan kondisi 4,750 km baik, dan 6,460 km rusak berat. Jalan tersebut termasuk ruas Jalur Jalan Lingkar Utara yang menjadi prioritas RPJMD Kabupaten. DPUPR telah membangun jalan beton sepanjang 7,5 km. Akan tetapi, masih terdapat ruas jalan di lahan perhutani sepanjang 3 km yang belum sama sekali dikerjakan. Kabupaten dalam proses menyelesaikan ijin perhutani, dan rencana pembangunan jalan sudah masuk RKPD tahun 2021. Mohon bantuan dan kerjasamanya.

17. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :

Assalamualaikum

Terkait penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan COVID 19. Apa semua desa bisa merubah APBDes untuk penanggulang Covid 19 apa harus menunggu Desa tersebut statusnya menjadi gawat darurat/Desa Zona Merah.

Terimakasih

(Bidang PPM)

Jawab : Mendasari SE Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 bahwa perubahan APBDes bisa dilaksanan oleh semua desa di kabupaten Kebumen.

18. Nama : Sutowo
Alamat : Tresnorejo, Petanahan
Pertanyaan :

1. Dengan adanya program pengembangan ekonomi pertanian, Langkah apa yang akan dilaksanakan terkait diwilayah petanahan masih banyak yang banjir musiman saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau
2. Langkah apa yang akan di laksanakan bidang terkait degan permasalahan tersebut
(Bidang PSDA)

Jawaban: Dalam mengatasi permasalahan pertanian khususnya yang terkait dengan pengairan, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus berupaya memperbaiki sarana prasarana irigasi, terutama yang dapat dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Adapun permasalahan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan tetap disampaikan agar dapat ditangani oleh pemilik kewenangan.

19. Nama : dr. Endang Wresni
Alamat : UPTD Puskesmas Bonorowo
Pertanyaan :

Pengadaan tanah mohon bisa direalisasi karena sebagian puskesmas kami masih menempati tanah desa, sedangkan desa juga terbentur masalah aset desa, Sedangkan kegiatan di RKPD Dinkes kok saya lihat masuk pada sub kegiatan pembangunan puskesmas, Apa itu bisa direalisasikan, kami mohon mengingat kami sangat membutuhkan untuk operasional kegiatan puskesmas tetapi terbentur dengan masalah aset desa. Terima kasih
(Bidang PPM)

Jawab : Terkait penempatan nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 rekening belanja pengadaan tanah tidka menjadi kewenangan Kabupaten, namun hasil koordinasi dengan Kemendagri pengadaan bisa dimasukkan dalam subkegiatan Pembangunan Puskesmas, semoga bisa terelisasi.

20. Nama : Nur Khasanah
Alamat : Delegasi Disdukcapil
Pertanyaan :

Assalamualaikum, Saya sedang menyimak acara Musrenbang kabupaten kebumen. Saya mau usul kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen agar mengoptimalkan layanan jemput bola ke desa-desa untuk masyarakat yang jompo, sakit-sakitan dan difabel.

Jawab : Terima kasih atas masukannya, akan kami koordinasikan dengan Disdukcapil. Untuk melayani masyarakat jompo, sakit-sakitan dan difabel sudah ada layanan jemput bola ke desa-desa.

Usul kedua, untuk setiap kecamatan yang ada di kabupaten kebumen, saya harapkan untuk bisa melakukan perekaman dan cetak KTP elektronik
(Bidang PPM) :

Jawab : Saat ini ada 12 Kecamatan yang sudah melayani Perekaman dan cetak KTP.

21. Nama : Sri Kuntarti
Alamat : Camat Petanahan
Pertanyaan :
Usulan peserta musrenbang RKPD ;

1. Hasil musrenbangcam Petanahan kami mengusulkan Saluran drainase Jalan Kabupaten dari Grogolpenatus - Grogolbeningsari karena setiap hujan deras jalan tersebut terjadi banjir besar dan deras, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Apabila dimungkinkan untuk bisa diakomodir. (Bidang IK)

Jawaban :

Terimakasih masukannya.

Saluran drainase rawan banjir jalan kabupaten ruas Klirong – Petanahan yang melewati Grogolpenatus-Grogolbeningsari sudah masuk prioritas RKPD.

2. Pada materi, dalam Renja Bidang Infrastruktur hal 4 ada kegiatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan untuk jalan Klirong - Petanahan (tanjakan dan pertigaan petanahan ke timur) mohon penjelasan terkait lokasi tersebut. (Bidang IK)

Jawaban :

Terimakasih masukannya.

Lokasi pasti Drainase Desa Petanahan Rt 01, 02 atau Rw 03 Kecamatan Petanahan (P); Desa Jogomertan,/Pertigaan Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan (P) yang sudah masuk prioritas RKPD, akan menunggu survey dan pembuatan DED oleh DPUPR.

3. Terkait rencana Pembangunan Kawasan Industri, kami berharap bisa secepatnya terealisasi, karena hal ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. (Bidang PSDA)

Jawab : Sampai dengan saat ini, proses pembangunan kawasan industry sudah sampai pada tahap menunggu terbitnya HPL dari Kementerian ATR. Terkait hal ini, Pemkab melalui Bag Pemerintahan terus mengawal proses terbitnya HPL tersebut.

22. Nama : Dyah
Alamat : Inspektorat
Pertanyaan :

1. Belanja Modal pada rencana awal RKPD sebesar .404.56M atau baru 13% dari Total Belanja, kiranya dapat ditambah, dengan cara mengurangi belanja barang dan jasa dengan pertimbangan diberlakukanya Perpres no 33 th 2020, ditambahkan ke Belanja Modal atau menambah pendapatan. (Bidang PPP)
2. Pensertifikatan tanah Pemda Dianggarkan di Opd mana? (Bidang PPM)

Jawab : Anggaran ada di Bagian Pemerintahan Setda Kebumen.

23. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :
Tanya :

Adanya kebijakan hanya aset pemda (yang ada di KIB A) yang bisa dibangun membuat kami (pemerintah kelurahan) repot karena usulan dari masyarakat perihal pembangunan jalan/gang di lingkungan warga dan saluran air tidak bisa kami akomodir, karena tanah tidak masuk aset pemda.mohon solusinya? (Bidang PPM)

Jawab : Terkait inventarisasi asset dikelurahan telah dilaksanakan oleh BPKAD, dan dilakukan pensertifikatan tanah oleh Bagian Pemerintahan.

24. Nama : Kasimin
Alamat : Pemdes Tanggulangin Delegasi Kecamatan Klirog
Pertanyaan :

1. Terkait penanganan penyebaran Virus, Kalau Masjid ditutup, tolong swalayan, pasar hewan di tutup. Kalau tidak warga akan tetap buka Masjid untuk Jumatan. (Bidang PPM).

Jawab : Terima kasih atas masukannya dan toko swalayan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarkat (*basic need*)

2. Kalau Kebumen benar-benar masuk kategori KLB/ zona merah tolong DD segera di transfer tanpa terkecuali Terima kasih. (Bidang PPM dan IK)

Jawaban PPM : Kabupaten Kebumen belum kategori KLB, saat ini kondisi masih tanggap darurat sehingga proses tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jawaban IKA :

Terimakasih masukannya. Penanggulangan bencana covid.19 ditangani oleh Gugus Tugas Covid.19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai protokol covid.19 dari Pemerintah.BPBD Kabupaten Kebumen senantiasa berkoordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Mohon dukungan dan kerjasamanya

25. Nama : Wibisono Susanto
Alamat : Forum Pembudidaya Ikan/ FPI Kec. Bonorowo (Delegasi Dinlutkan)
Pertanyaan :

1. Kami Minta Untuk Th. 2021 Pemkab Ada Anggaran khusus untuk Membangun Sarana Eduwisata terkait dengan Budidaya Perikanan, Pertanian dan Peternakan. Hal tersebut adalah salah satu Upaya untuk Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan. (Bidang PSDA)

Jawab: Pembangunan sarana eduwisata ini, perlu diawali dengan kajian/studi kelayakan agar perencanaan lebih terarah

2. Mulai Tahun Anggaran 2021 Kami minta agar Anggaran untuk Budidaya Perikanan di Kec.Bonorowo agar ditambah. (Bidang PSDA)

Jawab: Usulan agar dapat disampaikan sesuai dengan jadwal, tahapan dan mekanisme perencanaan yang ada, baik melalui musrenbang desa/ kelurahan dan musrenbang kecamatan. Selanjutnya usulan akan diverifikasi secara teknis oleh masing-masing perangkat daerah terkait.

3. Pemkab/Dinas Terkait harus melakukan Monitor dan Evaluasi terhadap Bantuan-bantuan yang di turunkan Ke Kelompok-kelompok, agar terwujudnya kelompok yang mandiri dan berdaya, guna menanggulangi kebocoran-kebocoran anggaran. (Bidang PSDA)

Jawab: Pemerintah daerah akan terus berupaya memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk di dalamnya masukan dan informasi dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi.

26. Nama : Sugito
Alamat : Camat Alian
Pertanyaan :
Mohon memberi msukan :

Prioritas Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :

1. Mohon stadion kebun di Alokasikan anggaran, pertama depan stadion ada dua buah taman yang menjorok ke jalan sering membahayakan pengguna jalan mohon di hilangkan. (Bidang PPM dan PSDA)

Jawab: Terkait adanya dua buah taman yang menjorok ke jalan sudah masuk dalam rencana kegiatan tahun 2020 yang tercakup dalam pekerjaan pembongkaran media jalan.

2. Mohon stadion khususnya seputar stadion semakin tidak terkendali banyak warung liar mengganggu ketertiban dan keindahan. (Bidang PSDA)

Jawab: Sudah ada pelarangan dan tidak dibolehkan berdirinya warung disekitar stadion. Warung yang terdata saat ini ada sebanyak 31, dan akan dilakukan penataan secara bertahap. Dalam DED pembangunan tribun penonton Chandradimuka, telah disiapkan penataan kios/warung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah.

3. Mohon seputar stadion biar menarik di buat taman bunga saja jangan di biarkan banyak rumput seperti itu, sekaligus sebagai taman bunga untuk rekreasi (Bidang PSDA)

Jawab: Sesuai site plan Stadion Chandradimuka, sudah mengakomodir pembuatan taman di beberapa titik. Namun untuk mewujudkannya masih menunggu ketersediaan anggaran

4. Bekait dengan SMP SATAP yang ada di Alian, mohon di Kaji apa masih di perlukan tidak, kalau masih di perlukan untuk di perhatikan, kalau tidak ya di hapus saja, kondisi sekarang mati segan hidup tak mau. Terima kasih (Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya, akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan.

27. Nama : Pujiono
Alamat : Delegasi Buluspesantren
Pertanyaan :

- a. Jln tembus dari ibu kota kabupaten sampai dengan jln lingkar selatan selatan untuk diperlebar. Khususnya dari pertigaan kecamatan bulus smpai dengan pertigaan jln selatan selatan. (Bidang IK)
b. Saluran irigasi /gorong/jembatan yang menjadi kewenangn kabupaten perlu di renovasi/bnyak yang fungsinya kurang optimal yang mengakibatkan aliran irigasi kecil/tersumbat, mengakibatkan banjir. (Bidang IK)
c. Di jaringan irigasi sekunder perlu di buat filter-filter sampah, biar wilayah selatan tidak menjadi lumbung sampah khususnya sampah plastik di area pertanian. Matur nuwun (Bidang PSDA dan IK)

Jawaban :

a.Terimakasih masukannya. Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020, kondisi ruas jalan kabupaten di daerah Kejayan – Pantai (Buluspesantren) panjang 1,946 km dan lebar 5 meter, semuanya dalam kondisi baik. Usulan pelebaran menjadi 6 m, dapat dilakukan dengan cara pengadaan tanah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

b.Masukan saluran irigasi/gorong/jembatan kewenangan kabupaten yang rusak dan menyebabkan banjir akan kami masukkan dalam RKPD. Selain itu, mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk tidak membuang sampah di sungai atau saluran irigasi.

c.Jaringan irigasi sekunder yang ada di wilayah Buluspesantren masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan melibatkan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) setempat dapat dilakukan di saluran tersier. Pemkab dapat membantu dengan mengoperasikan bangunan penangkap sampah di saluran sekunder Kebumen (dekat Pegadaian jalan Pahlawan dan dekat jalan H.M Sarbini)

Jawab: Irigasi sekunder menjadi kewenangan DPUPR

28. Nama : Udy Cahyono
 Alamat : Kecamatan Bonorowo
 Pertanyaan :
 Ditahun 2021 program / keg apa untuk recovery berbagai bidang sebagai dampak Wabah Covid 29.?
 (Bidang PPM dan PPP)
Jawab : Terkait dengan program/kegiatan recovery maka akan disesuaikan kegiatan di masing masing OPD, baik dampak social maupun dampak ekonomi. Terima kasih atas masukannya, sebagai bahan pembahasan RKPD tahun 2021.
29. Nama : Sartugiono
 Alamat : Kebonsar, Petanahan
 Pertanyaan :
 Saya berpendapat pribadi bahwa pembangunan yang berprinsip "bottom up" di Kebumen belum berjalan maksimal. Hal tersebut, salah satunya adalah adanya buku pintar yang diberikan kepada desa pada saat penyusunan RKP Desa dimana juga mengusulkan 6 usulan pembangunan supra desa, dimana dalam buku pintar tersebut dibatasi oleh kegiatan masing-masing dinas, sehingga membatasi penanganan berbagai permasalahan yang ada di desa. Padahal ada beberapa kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa namun justru permasalahan-permasalahannya dirasakan oleh masyarakat desa. Terkait hal tersebut seolah bahwa prinsip pembangunan yang seharusnya "bottom up" tetapi seolah-olah berprinsip "Top down". Demikian mohon pencerahan dan kebijakannya mengenai berbagai permasalahan yang berbeda di setiap desa.
 (Bidang PPP dan PPM)
Jawab : Dalam pelaksanaan pembangunan desa tahapan tahapan perencanaan yang meliputi Musrenbangdes, Musrenbangcam, seyogyanya berbasis pada permasalahan masing masing desa, sehingga usulan yang disampaikan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Pembatasan 6 usulan tersebut harapanya sudah merupakan prioritas yang bisa menangani permasalahan desa.
30. Nama : Sabit Banani, SH
 Alamat : Kecamatan Petanahan
 Pertanyaan :
 a. Harap dilakukan Normalisasi sungai menyeluruh di wilayah kebumen. Dilengkapi dengan bendungan agar menjadi fasilitas pengairan berbasis sungai. Agar tidak tergantung pada pengairan teknis yang makin berkurang. ini dukungan vital bagi petani. (Bidang IK)
Jawaban: Secara umum kewenangan normalisasi sungai ada di Pemerintah Pusat, sesuai UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 15, namun masih menunggu ketentuan turunannya. Pada saat ini kegiatan normalisasi sungai dapat dilakukan Kabupaten setelah mendapat ijin atau perjanjian dengan Pusat. Akan kami koordinasikan.
 b. Buat desain program pengentasan kemiskinan berbasis Desa. Bukan dinas sektoral semata. Bukan hanya pendataan. (Bidang PPM)
Jawaban : Terima kasih atas masukannya, akan kami koordinasikan dengan Bidang P3 untuk membuat kajian.
31. Nama : Fuad
 Alamat : Delegasi Bapenda
 Pertanyaan :
 a. Adanya dampak Covid-19 tentunya berdampak terhadap melemahnya kondisi ekonomi kebumen yang mengakibatkan berubahnya kondisi PDRB dan PAD. Khususnya dari sektor restoran, hiburan dan hotel. Maka kami mengusulkan adanya kajian PAD untuk menentukan target PAD. (Bidang PSDA)
Jawab: Terkait dengan dampak COVID 19, telah dilaksanakan penyesuaian target PAD di beberapa perangkat daerah. Apabila nantinya masih diperlukan kajian untuk mengukur dampak lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan kajian khusus terkait hal tersebut.
 b. 2. Berapa alokasi anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak covid 19 untuk tahun 2021 baik dari APBD maupun Dana desa. (Bidang PPM)
Jawab : Alokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 baik yang bersumber dari APBD maupun APBDes masih dalam pembahasan.
32. Nama : Wahid Mulyadi, A.Md
 Alamat : DPRD Kabupaten Kebumen/ Anggota komisi D/ Fraksi PPP

Pertanyaan :

- a. Terkait usulan-usulan POKIR anggota dewan tetap harus tercatat, diinventarisir kemudian dijadikan bahan oleh Pemkab sebagai Long List. Usulan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan survey lapangan dan kajian teknis yang nantinya menjadi Medium List. Usulan kemudian ditindaklanjuti dengan analisa skala prioritas dan analisa ketersediaan anggaran menjadi Short List yang nantinya bisa diusulkan melalui e-planning ke Provinsi dan e-planning ke pusat. (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima kasih atas masukannya.

- b. Kami mailh melihat alokasi Kuota Kecamatan untuk RKPD tahun 2021 masih ada yang dibagi rata penganggarnya dan usulan desa yang masuk Kuota Kecamatan masih ada/ belum dikaji, dianalisa dan disurvey oleh OPD terkait, sehingga terkesan asal dapat dan rata tanpa melihat aspek skala prioritas, aspek kebutuhan biaya dan aspek secara teknis. (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Kuota Kecamatan telah dilakukan Desk dan kajian lapangan oleh OPD terkait dan aturan kegiatan Kuota kecamatan sudah sesuai dengan Juknisnya, apabila terdapat kecamatan yang membagi rata kuota kecamatannya, hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan musyawarah tanpa mengindahkan Juknis yang ada.

- c. Anggaran Kuota Kecamatan agar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan potensi-potensi unggulan dari kecamatan dimaksud dan per kecamatan alokasinya tidak sama (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Alokasi Anggaran tiap kecamatan berdasarkan variable proporsi dan pertumbuhan wilayah.

- d. Terkait Kegiatan SPAM yang menggunakan sumur bor khususnya di daerah Pegunungan (Padureso, Poncowarno dan Karanggayam) untuk dikaji lebih dalam terkait aspek teknis dan kebutuhan biaya apa sudah cukup karena lokasi dimaksud daerah pegunungan dan sumber-sumber air termasuk dalam. (Bidang IK)

Jawaban: Terkait Kegiatan SPAM yang menggunakan sumur bor dalam, sampai saat ini belum ditangani oleh Kabupaten Kebumen. Desa dapat membuat proposal usulan sumur bor dalam melalui DPUPR yang akan disampaikan dan dikerjakan oleh Dinas ESDM Provinsi dan Badan Geologi Bandung (Kementerian ESDM). Pembangunan sumur bor dalam memerlukan kajian hidrolistrik, perijinan dan kajian dampak lingkungan. Proposal ditujukan langsung ke Badan Geologi, Kementerian ESDM Bandung dengan tembusan kepada Bupati Kebumen. Atau bisa juga mengajukan usulan Proposal ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

- e. Terkait kegiatan JITUT dan JIDES untuk dikaji lebih dalam terkait aspek teknis, aspek kebutuhan biaya apakah sudah sesuai atau belum, juga terkait aspek manfaat dan outcome harus lebih diperhatikan sehingga kegiatan dimaksud betul-betul terlihat dampak dan manfaat yang signifikan. (Bidang PSDA)

Jawab: Semua usulan penyediaan sarana dan prasarana pertanian termasuk JITUT/ JIDES harus melalui proses verifikasi oleh dinas teknis, untuk memastikan usulan tersebut dapat dilaksanakan secara teknis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- f. Untuk Pelaksanaan kegiatan Kuota Kecamatan kami berpendapat dan mengusulkan agar dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh pihak Kecamatan (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima kasih atas usulannya, kuota kecamatan dilaksanakan di OPD karena keterbatasan SDM di tingkat Kecamatan.

- g. Bahwa yang masuk usulan atau Simper untuk RKPD Tahun 2021 adalah hasil menjangkau aspirasi masyarakat melalui Rses Masa Sidang I (13 Agustus 2019 s.d 13 Desember 2019), kami berharap untuk Reses Masa Sidang II dan Reses Masa Sidang III dijadikan Long List usulan RKPD Tahun berikutnya dan bisa ditindaklanjuti melalui verifikasi, validasi dan survey lokasi (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima kasih atas masukannya.

- h. Terkait Data base untuk semua jenis sebagai dasar untuk membuat perencanaan kami meminta untuk betul-betul valid dan margin errornya berkisar +/- 4% dan data base dimaksud harus dikomunikasikan antar Eksekutif dan Legislatif. (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima Kasih atas masukannya.

- i. Terkait program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 semua SKPD harus betul-betul memahami outcome yang diinginkan oleh Peraturan dimaksud dan diharapkan SKPD mampu mengadakan kegiatan yang inovatif, efektif dan tepat guna serta tepat sasaran. (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terimakasih atas masukannya.

- j. Perlu kajian mendalam terhadap IKU apakah betul-betul sudah sesuai dengan fakta dilapangan, sehingga kami mendorong untuk dilakukan Review Capaian IKU. (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima kasih atas masukannya.

33. Nama : M. Yuli Nurwahib
Alamat : Pendamping Desa Kecamatan Karanganyar
Pertanyaan :

Kepada Bapak Bupati mohon dijelaskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih detail sementara pengesahan perbup PBJ dan Perbup DD yang selalu terlambat.

Jawab : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kebumen dengan mengurangi pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Terkait pengesahan Perbup PBJ dan Perbup DD telah dilakukan pembahasan lebih awal.

Kepada Bapak Sarimun S.Sy Ketua DPRD Kebumen Mohon dijelaskan kinerja yang telah dilakukan berkaitan regulasi yang belum tuntas dan rencana ke depan. Terima kasih
(Bidang PPM)

34. Nama :
Alamat :
Pertanyaan :
Saran & masukan terhadap dokumen RKPD 2021 sbb:

- a. Bappeda agar supaya bisa menambah pagu anggaran DPMPTSP sebesar Rp 2.7 miliar dlm rangka penguatan MPP, utk peningkatan kualitas layanan pembuatan pasport warga Kebumen. Hal ini merupakan terobosan yg sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Kebumen dari sisi efisiensi biaya dln pembuatan pasport tdk perlu ke Kab. Cilacap. (Bidang PSDA)

Jawab: Kalau yg dimaksud adalah pelayanan 100% pembuatan pasport, dari Kemenkumham minta Pemkab utk melakukan studi/kajian terkait hal tsb. Hal itu mjd salah syarat yg hrs dipenuhi. Tentunya hrs dikoordinasikan lbh Injnt dg kemenkumham dan pihak2 terkait lainnya.

- b. Untuk anggaran POKIR ANGGOTA DPRD Kebumen, tetap seperti saat ini masing - masing Anggota Rp 1 miliar, agar tidak terjadi kepincangan dlm implementasi kegiatan di renja OPD. POKIR WAJIB beorientasi kegiatan yg mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan Kebumen, agar sesegera mungkin terbebas dari predikat Kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Ngaten sekedar masuka n dr saya ibu. Matur nuwun (Bidang PPM dan PPP)

Jawab : Terima kasih atas masukannya, alokasi penggunaan anggaran POKIR sudah disepakati untuk penanggulangan kemiskinan dan Pencapaian IKU Daerah.

35. Nama : Achmad Bahrn
Alamat : Desa Karangrejo Kec.Karanggayam
Pertanyaan :

1. Jembatan sungai lukulo/ jembatan karangrejo-kaligending penghubung kecamatan karanggayam-karangsambung, Kok seprtinya dalam materi belum ada? Apakah sudah dianggarkan apa belum pak bupati ?? Kalau belum mohon untuk dianggarkan (Bidang IK)
2. Jalan/jalur karanggayam-Kalirejo dan Peniron- kebakalan rusak parah, mohon untuk di anggarkan, sekian matursuwun (Bidang IK)

Jawaban :

1.Terimakasih masukannya. Pembangunan jembatan kaligending tahap 2 sudah masuk di RKPD 2021 dengan anggaran 10 Milyar. DED dibuat sekitar tahun 2010. Pembangunan tahap 1 direncanakan dimulai tahun 2020.

2.Berdasarkan data DPUPR bulan Januari 2020,

a.Ruas Kalireja – Kenteng (Karanggayam, Sempor) 6,690, kondisi 1,600 km baik, 1,600 km sedang, 1,800 km rusak ringan dan 1,690 km rusak berat.

b.Ruas Peniron – Kebakalan (Pejagoan , Karanggayam) panjang 6,544 km, dengan kondisi 4,100 km baik, 1,000 km sedang, 1,000 km rusak ringan dan 0,444 km rusak parah

Pemeliharaan ruas jalan yang rusak menyesuaikan prioritas dan kondisi keuangan daerah. Khusus untuk penambalan jalan rusak oleh unit reaksi cepat jalan rusak DPUPR Bidang Binamarga, sudah dianggarkan 8 milyar di RKPD 2021. Mohon dukungan dan kerjasamanya.

36. Nama : Achmad Bahrn
Alamat : Desa Karangrejo Kec.Karanggayam
Pertanyaan :

Mohon penjelasan regulasi penggunaan dana desa untuk mendukung pencegahan virus corona. Ini menjadi persoalan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti sebagai pedoman desa dalam mengelola dana desa dalam penanganan corona. Terimakasih (Bidang PPM)

Jawab : Mendasari SE Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020, perubahan APBDes disesuaikan dengan kebutuhan masing masing desa.

37. Nama : Satuju
Alamat : Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen
Pertanyaan :

Assalamu'alaikum wr wb.

Yth. Bupati Kebumen.

Perlu saya sampaikan bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Desa di Kabupaten Kebumen sama (sama-sama berat, termasuk pada kegiatan sosial kemasyarakatan), namun penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara desa satu dengan lainnya berbeda yang disebabkan karena memiliki/tidak memiliki bengkok.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi aparat pemerintah desa, kami mengusulkan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen khususnya di desa-desa yang tidak memiliki bengkok bisa diberikan tambahan penghasilan/tunjangan yang bersumber dari APBD. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb. (Bidang PPM)

Jawab : Terima kasih atas masukannya, akan kami menjadi bahan masukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.